

DINAMIKA PROGRAM DAN KEBIJAKAN PENINGKATAN PRODUKSI PADI

Sri Wahyuni dan Kurnia Suci Indraningsih

*Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian
Jl. A. Yani No. 70 Bogor 16161*

ABSTRACT

Rice Production Enhancement Programs (P4) is consistently carried out by the government to meet domestic demand for rice. This paper describes dynamics of P4 implementation, namely their strengths and weaknesses. There were 11 programs launched, beginning with Central Rice Program (*Padi Sentra*) in 1958 up to Special Intensification (*Insus*) in 1979 with highest achievement of rice self sufficiency in 1984. *Insus* was improved in 1987 and it was then called as *Supra Insus*. In 1990 rice production was stagnant and rice import tended to enlarge. Rice Based Farming System with Agribusiness Orientation (SUTPA), Agribusiness Oriented Intensification (*Inbis*), and Self Reliance Movement on Rice, Corn, and Soybean (*Gema Palagung*) programs were introduced to anticipate changing domestic and international circumstances. *El Nino* took place when the programs were carried out triggering delay of harvest seasons and low production. At last, paradigm of agricultural development was improved through system development and agribusiness oriented, namely corporate farming as the starting point of on-going Integrated Crops and Resources Management (PTT) program. To induce the farmers nationwide to adopt technologies immediately the government copes with many constraints. It is suggested that the generated technologies are packed in sociodrama before disseminated intensively through various mass media, especially television.

Key words: *dynamics, program, rice*

ABSTRAK

Untuk mencukupi kebutuhan beras, pemerintah terus mengupayakan program peningkatan produksi padi (P4) melalui berbagai kebijakan. Tulisan ini mengemukakan dinamika P4 yang telah diimplementasikan dengan menganalisis kelemahan dan kekuatan suatu program. Tujuan penulisan untuk memperoleh opsi kebijakan P4 mendatang. Ada sebelas program yang telah diluncurkan, diawali dengan Program Padi Sentra (1958) hingga lahir Intensifikasi Khusus (1979) yang berhasil meraih swasembada beras (1984). Tahun 1987 *Insus* disempurnakan menjadi *Supra Insus*. Tahun 1990 produksi padi cenderung stagnan, import beras terus meningkat. Untuk merespon berbagai perubahan lingkungan internasional dan domestik diimplementasikan program Sistem Usahatani Berbasis Padi Berorientasi Agribisnis (SUTPA), Intensifikasi yang Berwawasan Agribisnis (*Inbis*) dan *Gema Palagung*. Saat program dalam implementasi terjadi *El-Nino* yang menyebabkan panen mundur dan produksi rendah. Akhirnya dilakukan pembenahan paradigma dalam pengembangan pertanian yaitu mutlak berbasis pengembangan sistem dan berorientasi agribisnis, yaitu usahatani korporasi yang selanjutnya menjadi dasar dalam program Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) yang sedang diuji. Selalu ditemukan kendala dalam menyebarkan teknologi yang telah dihasilkan dalam skala luas agar cepat diadopsi petani. Diusulkan agar teknologi yang telah dihasilkan dikemas dalam sosiodrama kemudian disebarluaskan secara intensif melalui berbagai media terutama televisi.

Kata kunci: *dinamika, program, padi*

PENDAHULUAN

Berbagai paket teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan produksi padi telah diimplementasikan melalui berbagai program nasional diantaranya Bimbingan Massal (Bimas) pada 1965 dan Intensifikasi Khusus (*Insus*) pada 1979 (Nataatmadja *et al.*, 1988) dan *Supra Insus* pada 1987. Dengan adanya program *Insus* tersebut produksi padi nasional

terus meningkat, sehingga pada tahun 1984 Indonesia berhasil berswasembada beras.

Pada tahun 1990 produksi dan produktivitas padi cenderung stagnan, sementara jumlah penduduk semakin meningkat dan permintaan beras juga terus meningkat sehingga kebutuhan beras terpaksa dipenuhi dari impor. Pada tahun 1990 jumlah impor sebesar 29.000 ton dan pada tahun 1991 serta 1992 meningkat masing-masing sebesar 513,8 persen dan 2.086,2 persen dibanding tahun

1990 (Surono, 2001). Usaha untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri terus dilakukan dengan mengimplementasikan berbagai program diantaranya Sistem Usahatani Berbasis Padi Berorientasi Agribisnis (SUTPA) pada tahun 1995-1999, namun demikian kenaikan tersebut belum mencukupi kebutuhan sehingga impor beras terus meningkat. Kelemahan dan kekurangan program terus diperbaiki dalam program selanjutnya, misalnya pada tahun 1998 lahir Program Intensifikasi yang Berwawasan Agribisnis (Inbis), dan Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI). Program Ketahanan Pangan (PKP) diluncurkan tahun 2000 disertai dengan pembenahan paradigma dalam rencana strategis pembangunan tanaman pangan tahun 2001-2004. Ditekankan bahwa pendekatan dengan paradigma utama adalah pengembangan sistem dan usaha agribisnis tanaman pangan. Departemen Pertanian merancang dua program/proyek yaitu program Pengembangan Agribisnis (PA) dan program Peningkatan Ketahanan Pangan (PKP)

Walaupun berbagai program peningkatan produksi beras telah diimplementasikan, namun demikian produksi dan produktivitas padi nasional tetap tidak mencukupi, sehingga impor beras tidak dapat dihindari dan akhirnya Indonesia menjadi *net-importer* terbesar di dunia. Produksi dan produktivitas padi masih harus ditingkatkan karena peranan beras di Indonesia sebagai sumber kalori sangat penting, terbukti pengeluaran untuk beras mencapai 25 – 30 persen terhadap total pengeluaran rumah tangga.

Menyikapi fakta diatas, Departemen Pertanian membuat komitmen yang dituangkan dalam rencana strategis pembangunan pertanian (Deptan, 2000) yaitu “pangan merupakan kebutuhan nasional yang sedapat mungkin dipenuhi oleh produksi dalam negeri, karena kekurangan pangan dapat memicu kekacauan politik, sosial dan ekonomi, serta diyakini bahwa prinsip agribisnis dapat mensejahterakan petani”. Maka program yang sesuai dengan kebutuhan petani dan sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sangat diperlukan.

Tulisan ini mengemukakan dinamika program peningkatan produksi padi (P4) yang telah diimplementasikan dengan menganalisis faktor-faktor kelemahan dan kekuatan dari program-program tersebut. Tujuan penulisan

adalah untuk memperoleh opsi kebijakan P4 ke depan.

DINAMIKA PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PADI

Dinamika P4 dapat dicermati dari paket teknologi yang ada dalam setiap program. Teknologi adalah cara untuk mencapai suatu tujuan pembangunan, yang dapat ditempuh melalui bantuan alat-alat atau bahan-bahan (*hard technology*) dan pendekatan atau jalinan hubungan antar individu yang terlibat dalam pembangunan (*soft technology*) agar tujuan dapat dicapai (Slamet, 1986). Mengacu pada konsep tersebut, selanjutnya dalam mengemukakan teknologi dari setiap program, dikelompokkan dalam kedua kategori tersebut. Garis besar teknologi untuk masing-masing program dikemukakan pada Tabel 1.

Program Padi Sentra (Tahun 1958)

Pengembangan P4 diawali dengan Program Padi Sentra pada tahun 1958 oleh BPMT (Badan Produksi Makanan dan Pembukaan Tanah) dibawah Departemen Pertanian, yang merupakan cikal bakal dari PT Pertani (Prakosa, 2000). Dalam periode Padi Sentra, teknologi keras (*hard technology*) yang diperkenalkan adalah varietas unggul nasional seperti Bengawan, Jelita, Dara, Sigadis dan varietas lokal yang menurut pengujian Dinas Pertanian setempat memiliki produktivitas unggul. Dalam penerapan varietas tersebut diperlukan partisipasi masyarakat (*soft technology*) sehingga dibentuklah Komando Operasi Gerakan Makmur (KOGM) pada tahun 1959 melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1959. Khusus untuk wilayah Jawa Barat dibentuk Organisasi Pelaksana swasembada beras (OPSSB).

Program padi sentra ini kurang berhasil karena dua hal yaitu lemahnya infrastruktur dan kondisi politik (Nataatmadja *et al.*, 1988) dimana penyuluhan pertanian praktis tidak ada dan seluruh pelayanan dilaksanakan oleh aparatur Padi Sentra, mulai dari pemberian kredit, persiapan peserta sampai ke pelayanan sarana produksi dan penarikan kredit. Kondisi politik pada waktu itu masih sangat labil dan kurang mendukung pelaksanaan program.

Tabel 1. Program Peningkatan Produktivitas Padi, Paket Teknologi Anjuran serta Kelemahan dan Kekuatannya

Nama program	Tahun	Technology		Kelemahan aktual	Kekuatan aktual
		Hard technology	Soft technology		
Padi sentra	1958	Varietas Si Gadis, Jelita, Dara dan Bengawan	Inpres I/1959 (Komando Operasi Gerakan Makmur)	Top-down sehingga tidak mampu membangkitkan partisipasi masyarakat	Sosialisasi melalui demplot merupakan diseminasi efektif
Bimas	1965	Varietas Si Gadis, Jelita, Dara dan Bengawan	Perbaikan kelembagaan: Irigasi, penyuluhan, penelitian, industri pupuk, perbenihan dan koperasi (KUD).	Kemampuan dana terbatas	Kerjasama antar lembaga harmonis
Inmas	1968	Varietas Bimas + PB5 dan PB8	Sama dengan Padi Sentra, tetapi tanpa KUD	Kemampuan dana terbatas	Perbaikan irigasi dan prasarana lain, perbaikan sistem dan organisasi penyuluhan, didirikannya Perum Sang Hyang Seri dalam rangka perbaikan pengadaan benih unggul
Bimas Gotong Royong	1969	Varietas Bimas + PB5 dan PB8	Sama dengan Bimas + pilot proyek kelembagaan tingkat desa (tahun 1975=KUD)	Bibit dan dana terbatas Varietas tidak sesuai budaya masyarakat Kurang sosialisasi	Adanya suntikan dana dari perusahaan multi nasional (Mitsubishi & CIBA) untuk pengadaan saprodi (pupuk, pestisida, sprayer dan kendaraan)
INSUS	1979	Panca usahatani berupa varietas, pemupukan obat-obatan, bercocok tanam dan irigasi	Sama dengan Bimas Gotong Royong + Kerjasama kelompok tani sehamparan	Tidak bisa diimplementasikan di semua wilayah	Kerjasama kelompok tani sehamparan Teknologi meliputi semua tahapan usahatani Spesifik wilayah Kelembagaan mulai tingkat provinsi sampai kelompok tani
SUPRA INSUS	1987	Sapta usaha berupa Panca Usaha ditambah Pola tanam dan Pasca panen	Sama dengan INSUS + Organisasi diperkuat dengan Pos Simpul Koordinasi (POSKO) di setiap wilayah administrasi	Kelelahan teknologi berupa stagnasi dan ketidakstabilan produksi (<i>Technology fatigue</i>)	Efisiensi ekonomi : skala usaha dengan cakupan areal 600-1000 ha, terdiri dari beberapa kelompok tani yang berada dalam wilayah WKBPP ³⁾

Tabel 1. (Lanjutan)

Nama program	Tahun	Technology		Kelemahan	Kekuatan
		Hard technology	Soft technology		
SUTPA	1994	Sama dengan SUPRA INSUS + Varietas:Cibodas dan Membramo Alsintan:Atabela dan Urea aplikator	Kerjasama kelembagaan terkait 1. Pendekatan multi disiplin 2. Ekoregional 3. Agribisnis, 3 dimensi diversifikasi	Sosialisasi orientasi agribisnis belum berhasil	Keterkaitan antara peneliti-penyuluh-petani-dinas teknis-pemerintah daerah atas dasar hubungan kerja fungsional, bukan dasar hirarki birokratis sehingga lebih berdaya guna. Rakitan teknologi yang dikaji bersifat spesifik lokasi, karena diputuskan oleh kelompok tani sendiri atas komponen teknologi yang ditawarkan oleh peneliti/penyuluh
INBIS	1997	Sama dengan SUTPA + Jaminan pasar Ameliorasi Pengelolaan bahan organik	Rekayasa sosial (pendampingan, kerjasama antar dan intern kelompok sehamparan). Rekayasa ekonomi (modal, nilai tambah off-farm dan standardisasi).	Saat implementasi terjadi El-Nino	Penerapan 12 komponen rekayasa teknologi yang disesuaikan dengan spesifik lokasi
Gema Palagung	1998	Sama dengan INBIS +PMI+IP-200 +IP-300	Idem INBIS + Pemberdayaan kelompok tani	Paket teknologi anjuran masih umum, dalam implemensasinya kurang sesuai dengan kondisi lokal	Pengembangan kelembagaan dan KUT
CF	2000	Sama dengan INBIS +PMI+IP-200 +IP-300	Konsolidasi manajemen sehamparan, mencakup <i>on</i> , <i>off</i> dan <i>non-farm</i>	Kesalahan persepsi tentang "konsolidasi"	Efisiensi sumberdaya terutama tenaga kerja, cakupan seluruh kegiatan petani dan keputusan CF berada dalam satu kesatuan
PKP	2000	Sama dengan INBIS +PMI+IP-200 +IP-300	Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)	Panduan terlambat, pemanfaatan BLM tidak sesuai, Intervensi petugas, Kemampuan administrasi kelompok rendah, Sulit dimonitor.	Luas hamparan dengan skala agribisnis, pengelolaan usahatani secara profesional oleh manajer, adanya dana BLM
P3T	2001-2003	Keterpaduan teknologi (holistik) IPM, INM, IWM, IweM	KUAT + KUM	Dalam pengujian	Bottom-up, spesifik lokasi, Holistik, Modelling, Berkaidah ilmiah

Keterangan : *) WKBPP : Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian.

Menurut Prakosa (2000) penyebab kegagalan yang sangat penting adalah dalam mengikutsertakan masyarakat dibuat komando yang secara implisit bersifat *top-down*. Kelembagaan yang dibangun berdasarkan sistem sosial formal tersebut membuat komunikasi kepemimpinan bersifat lugas sehingga tidak menciptakan jalinan hubungan yang akrab yang merupakan ciri khas interaksi sosial dalam masyarakat atau kelompok kecil yang anggotanya saling mengenal satu sama lain. Ditegaskan juga bahwa sistem sosial yang formal tidak menumbuhkan motivasi dan kendali sosial serta partisipasi petani untuk menggali produktivitas potensial.

Dari uraian diatas pelajaran penting yang dapat dipetik adalah (1) peningkatan produksi ditempuh melalui perbaikan varietas, (2) instruksi yang bersifat *top-down* tidak mampu membangkitkan partisipasi petani (3) sosialisasi melalui demonstrasi massal merupakan diseminasi yang efektif, dan (4) faktor penghambat yang perlu diperbaiki adalah jalinan hubungan antar lembaga pemerintah dan antara pemerintah dan petani.

Petani tidak usah didorong-dorong ataupun disuruh-suruh pasti mengikuti kalau teknologi yang diperkenalkan memang menguntungkan, walaupun tanpa diberi kredit. Kenyataan yang telah diuraikan menunjukkan perlunya *soft technology* mulai dari jalinan hubungan antara petani dan pemerintah dan antar lembaga dalam pemerintah serta sarana dan prasarana yang memadai.

Bimbingan Massal (Bimas) Tahun 1965

Mengatasi kegagalan Padi Sentra, Lembaga Koordinasi Pengabdian Masyarakat (LKPM), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan suatu pilot proyek (Demplot) di Karawang dengan luas areal 100 ha pada musim hujan 1963/64, untuk membuktikan bahwa teknologi yang dianjurkan dalam Padi Sentra dapat menguntungkan petani. Departemen Pertanian merespon hal tersebut dengan menerapkan program intensifikasi mengikuti pola kerja dalam Pilot Proyek Karawang pada tahun 1964/65 meliputi areal seluas 11.000 ha (Denarea), dan berhasil menyebar kepada petani di sekitarnya. Program tersebut dikenal sebagai Program Demonstrasi Massal (Demas) dan pada tahun berikutnya mengalami penyesuaian yang

mapan menjadi BDN (Bimas Nasional yang Disempurnakan) yang lebih dikenal dengan Bimas (Bimbingan Massal).

Teknologi yang dianjurkan Bimas prinsipnya mengacu pada usaha yang telah dilakukan dan mengantisipasi kegagalan yang pernah dialami selama Program Padi Sentra. Dengan demikian, Bimas merupakan perbaikan dalam *soft technology* yang berkaitan dengan kelembagaan-kelembagaan: sarana irigasi, sistem dan organisasi penyuluhan, lembaga penelitian untuk menghasilkan varietas padi dengan ketahanan majemuk terhadap hama dan penyakit utama dan sistem penelitian terpadu, lembaga industri pupuk nasional, Perum Sang Hyang Seri untuk perbaikan pengadaan benih unggul, dan kelembagaan koperasi (KUD).

Selama program Bimas berjalan, penerapan varietas terus meluas, dan jalinan kerjasama kelembagaan semakin harmonis. Untuk mengantisipasi kebutuhan kredit yang melebihi kemampuan Bimas, maka pada tahun 1968 Bimas melakukan intensifikasi secara massal (Inmas).

Intensifikasi Program Bimas Secara Massal (Inmas) Tahun 1968

Intensifikasi Program Bimas secara Massal (Inmas) diimplementasikan pada musim kemarau 1968. Disamping teknologi yang diimplementasikan selama Bimas, diperkenalkan *hard technology* yaitu varietas baru dari Lembaga Penelitian Padi Internasional IRRI (*International Rice Research Institute*), yaitu PB 5 dan PB 8. Bedanya dengan Bimas, implementasi intensifikasi massal tersebut tidak didampingi dengan fasilitas kredit.

Inmas mengalami masalah pendanaan karena untuk memperluas areal intensifikasi diperlukan jumlah bibit yang lebih banyak, sementara fasilitas kredit tidak memadai. Pada saat itu (awal Pelita I), pemerintah juga sedang mengalami kekurangan dana untuk pembangunan. Untuk memenuhi dana dalam memanfaatkan bibit unggul baru secara massal, dibentuk Bimas Gotong Royong (Nataatmaja *et al.*, 1988).

Bimas Gotong Royong (Tahun 1969)

Bimas Gotong Royong adalah Bimas yang dananya dibantu secara bergotong

royong oleh beberapa perusahaan multinasional, yaitu Mitsubishi dan CIBA. Perusahaan tersebut bertanggung jawab mengadakan sarana produksi seperti pupuk, pestisida, kendaraan, sprayer, dan bahkan pesawat terbang yang digunakan untuk pengendalian hama dari udara (Nataatmadja *et al.*, 1988).

Hard technology yang diimplementasikan pada Program Bimas Gotong Royong masih merupakan teknologi yang terdapat pada Inmas, sedangkan *soft technology* yang menyertainya disamping merancang kerjasama dengan perusahaan besar adalah melakukan perbaikan mendasar dalam mengembangkan kelembagaan modal di tingkat desa. Inovasi tersebut dimulai dengan dilaksanakannya pilot proyek tahun 1975, yang kemudian dikenal dengan Koperasi Unit Desa (KUD).

Tidak semua areal dalam Bimas Gotong Royong menggunakan varietas jenis unggul baru, karena jumlah benih yang tersedia terbatas. Disamping itu masyarakat belum terbiasa mengusahakan padi PB, terutama saat pemanenan. Dengan varietas unggul lokal petani biasa memanen dengan ani-ani, dan menyimpan dalam bentuk tangkai. Untuk padi PB, petani harus merontokkan padi, kemudian menjemur lalu menyimpan dalam bentuk gabah. Cara tersebut harus dilakukan karena padi PB batangnya pendek. Penyebab lain kurang disukai padi PB adalah rasa nasi yang kurang enak. Kedua hal tersebut menyebabkan padi PB menghadapi kesulitan dalam pemasarannya.

Uraian diatas memberikan dua pelajaran penting yaitu perlunya dukungan dana dalam mengimplementasikan suatu teknologi, namun dukungan dana tersebut dalam pengenalan teknologi akan gagal jika tidak sesuai dengan sosial budaya petani. Menurut Prakosa (2000), kurangnya partisipasi masyarakat dalam menerima teknologi dan keterbatasan modal menyebabkan terjadinya *leveling off* dini. Gejala *leveling off* secara dini tersebut, dianggap oleh Adjid (1985) sebagai suatu kekuatan sosial yang terpendam dan dapat diubah menjadi kekuatan aktual melalui peningkatan partisipasi petani secara massal. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi tersebut muncul program inovasi berupa Intensifikasi Khusus (Insus).

Intensifikasi Khusus (Insus) Tahun 1979

Teknologi yang diimplementasikan dalam Insus mengadopsi pelajaran yang dapat dipetik dari program P4 sebelumnya. *Hard technology* yang dikenalkan adalah Panca Usaha sedangkan *soft technology* adalah memperbaiki kerjasama antar kelompok tani (*group farming*) dengan penekanan pada kerjasama para anggota dalam kelompok sehamparan. Teknologi panca usaha meliputi: pemakaian bibit unggul, pemakaian pupuk, pemakaian obat-obatan, cara bercocok tanam, dan perbaikan irigasi.

Insus diimplementasikan pada awal tahun PELITA III (1979) yang diatur dalam SK Menteri Pertanian/Ketua Badan Koordinasi Bimas No.003/1979 (Suryana *et al.*, 1982). Insus merupakan penyelenggaraan intensifikasi pertanian (dengan menerapkan panca usaha) yang dilaksanakan atas dasar kerjasama para anggota kelompok tani dalam satu hamparan usahatani guna memanfaatkan sumberdaya (lahan, teknologi dan dana) secara optimal (Sekretariat Badan Pengendali Bimas, 1992).

Melalui program Insus tersebut pemerintah mampu mengatasi terjadinya *leveling off* dini dan mendongkrak produktivitas padi pada tahun 1980 sehingga tercapai swasembada beras pada tahun 1984. Namun, sangat bervariasi kondisi wilayah di Indonesia membuat Insus tidak mudah dilaksanakan di semua wilayah. Untuk itu pada daerah-daerah yang mengalami berbagai hambatan dalam melaksanakan program Insus, dilaksanakan Program Operasi Khusus (Opsus). Contoh Opsus adalah gerakan gogorancha di Nusa Tenggara Barat dan Gunung Kidul (Nataatmadja *et al.*, 1988). Sementara itu, areal diluar Insus dan Opsus dikenal dengan Inmum (Intensifikasi Umum) dimana adanya kelompok tani sehamparan bukan merupakan persyaratan didalam Inmum (Suryana *et al.*, 1992). Luasnya jangkauan dan bervariasi bentuk implementasi intensifikasi (Insus, Opsus dan Inmum) menuntut adanya lembaga yang mampu menjangkau petani.

Adanya Opsus menunjukkan bahwa Insus menyadari diperlukannya pendekatan spesifik wilayah. Artinya diperlukan adaptasi dari *hard technology* yang dianjurkan di setiap wilayah implementasi. Inmum mencerminkan ketidakmampuan dari lembaga yang ada untuk

membina semua wilayah. Disadari pula perlunya menumbuhkan kemandirian petani atau masyarakat dalam mengadopsi suatu teknologi. Untuk mengatasi masalah selama Insus, dibentuk suatu WKPP (Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian) sebagai suatu rekayasa sosial dalam melaksanakan intensifikasi pertanian. Dalam mewujudkan rekayasa ekonomi agar usahatani memberikan keuntungan yang memadai ditetapkan batasan skala usaha yang efektif.

Supra Insus (tahun 1987)

Supra Insus adalah penggabungan upaya rekayasa sosial-ekonomi dalam wilayah yang lebih luas. Selanjutnya Supra Insus didefinisikan sebagai suatu rekayasa sosial dan ekonomi dalam penyelenggaraan intensifikasi pertanian yang dilaksanakan atas dasar kerjasama antar kelompok tani pelaksana Insus dalam satu WKPP yang selanjutnya disebut Unit Supra Insus (USI). Luas areal satu usahatani USI ditetapkan antara 600 sampai dengan 1000 ha agar diperoleh keuntungan yang efektif (Sekretariat Badan Pengendali Bimas, 1992 :3). Rekayasa sosial ekonomi tersebut merupakan *soft technology* dalam Supra Insus.

Hard technology yang diintroduksikan didasarkan konsep panca usaha dari Insus ditambah dua teknologi lain yaitu pengolahan lahan dan pasca panen sehingga menjadi Sapta Usaha, disamping itu cara bercocok tanam disempurnakan menjadi lebih spesifik wilayah. Akhirnya Sapta Usaha meliputi: (1) Pola tanam setahun yang sesuai dengan wilayah; (2) Pengolahan tanah secara sempurna dan berdasarkan kesepakatan kelompok; (3) Penggunaan benih (bersertifikat label biru yang keberadaannya ditunjang dengan pembinaan penangkaran benih dalam setiap wilayah Himpunan Supra Insus dan pergiliran varietas antar musim sesuai rekomendasi Dinas Tanaman Pangan setempat dan jumlah benih 2-3/lubang sehingga populasi tanaman 200.000 rumpun/ha); (4) Penerapan pupuk berimbang, pupuk pelengkap cair dan zat pengatur tumbuh; (5) Pengendalian organisme pengganggu; (6) Tata guna air; dan (7) Pengelolaan pasca panen.

Ditetapkan pula bahwa pelaksana Supra Insus adalah organisasi Bimas yang

diperkuat dengan Pos Simpul Koordinasi (POSKO) pada setiap wilayah administrasi. POSKO dimulai dari tingkat provinsi sampai desa dan kelompok tani (Sekretariat Badan Pengendali Bimas, 1992).

Selama implementasi Supra Insus terjadi perubahan lingkungan strategis secara internasional dan domestik. Perubahan lingkungan strategis internasional diantaranya adalah : (1) meningkatnya tekanan implementasi kesepakatan GATT/WTO, (2) terjadinya revolusi transportasi telekomunikasi dan turisme, (3) globalisasi gerakan rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam, (4) globalisasi perlindungan hak azasi manusia, dan (5) gerakan perbaikan kualitas produk. Sementara itu perubahan lingkungan strategis domestik diantaranya adalah : (1) dinamika ekonomi makro, (2) dinamika sosio-kultural-politis, dan (3) dinamika struktur demografis dan masalah kemiskinan. Adanya globalisasi perdagangan dunia menyebabkan tata niaga komoditas pertanian baik di pasaran internasional maupun domestik semakin bersaing ketat, sementara kekuatan pembeli semakin dominan. Mengingat pasar pertanian bersifat pasar-pembeli (*buyer's market*) dimana volume dan harga ditentukan oleh preferensi dan daya beli konsumen, maka terjadilah persaingan yang sangat ketat. Untuk itu diperlukan produk dengan mutu yang terjamin dan berharga murah. Untuk itu perlu pengelolaan usahatani yang professional dan berorientasi agribisnis.

Untuk merealisasikan keterpaduan sistem agribisnis dijumpai berbagai kendala. Kerjasama kelompok sehamparan yang diharapkan mempunyai pengaruh kuat terhadap individu, sehingga tingkah laku individu benar-benar mampu merefleksikan tingkah laku kelompok sehamparan dalam mengelola usahatannya tidak dapat diwujudkan. Kelompok sehamparan yang diharapkan mampu menjadi agen pembaharuan pertanian tradisional menjadi modern menemui kegagalan karena masing-masing individu dalam kelompok mempunyai derajat kepentingan yang berbeda terhadap usahatannya. Luas lahan yang sempit menyebabkan kontribusi pendapatan usahatani terhadap pendapatan keluarga sangat kecil sehingga perhatian petani terhadap usahatani rendah, dan mereka lebih dekat pada sosok petani *part timer*.

Tabel 2. Luas Panen, Produksi, Produktivitas dan Program Peningkatan Padi di Indonesia, Tahun 1998-2002

Tahun	Luas panen (ha)	Produksi padi (ton GKG)	Produktivitas padi (ton/ha)	Nama program	Produksi beras (000 ton)	Tersedia untuk konsumsi (000 ton)	Total konsumsi (000 ton)	Impor (ton)
1976	8.368	23.301	2,78	BIMAS	15.845	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1977	8.360	23.347	2,79	"	15.876	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1978	8.929	25.772	2,89	"	17.525	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1979	8.850	26.283	2,97	INSUS	17.872	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1980	9.005	29.562	3,29	"	20.163	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1981	9.382	32.774	3,49	"	22.286	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1982	8.988	33.584	3,74	"	22.837	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1983	9.162	35.302	3,85	"	24.006	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1984	9.764	38.134	3,91	"	25.933	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1985	9.902	39.033	3,97	"	26.542	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1986	9.988	39.726	4,00	"	27.014	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1987	9.923	40.078	4,04	SUPRAINSUS	27.253	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1988	10.138	41.676	4,11	"	29.340	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1989	10.531	44.726	4,25	"	29.072	t.a.d	t.a.d	t.a.d
1990	10.502	45.179	4,30	"	29.361	24.076	24.409	29
1991	10.282	44.689	4,35	"	29.047	23.818	24.683	178
1992	11.103	48.240	4,34	"	31.356	25.712	24.965	634
1993	11.013	48.181	4,38	"	31.318	25.681	25.393	0
1994	10.734	46.641	4,35	"	31.321	24.863	25.642	876
1995	11.439	49.744	4,35	SUTPA	32.334	26.514	26.039	3.013
1996	11.569	51.101	4,41	"	33.216	27.237	25.913	1.090
1997	11.141	49.377	4,43	INBIS	31.206	25.589	26.549	406
1998	11.730	49.237	4,17	GEMA PALAGUNG	31.118	25.517	26.857	7.100
1999	11.963	50.866	4,52	PA dan PKP	32.147	26.361	27.290	5.014
2000	11.608	51.179	4,41	"	32.345	26.532	27.713	1.400
2001	11.424	50.080	4,38	"	31.651	25.954	27.972	0,73
2002	11.013	t.a.d.	4,34	"	t.a.d.	t.a.d.	t.a.d.	1,22

Sumber : Diolah dari Surono (2001).

Keterangan : t.a.d. : tidak ada data

Perubahan lingkungan strategis dan kegagalan dalam pengembangan agribisnis yang profesional menyebabkan produksi semakin menurun. Selain itu, intensifikasi yang diterapkan selama ini menyebabkan kelelahan teknologi (*technology fatigue*) yang dicirikan dengan stagnasi dan ketidakstabilan produksi (Budiyanto, 2000). Konsekwensinya pada tahun 1990 Indonesia harus mengimport beras sebanyak 29 ton dan jumlah tersebut terus meningkat dimana pada tahun 1995 jumlah import menjadi 3.013 ton atau lebih dari 100 kali lipat (Tabel 2). Dalam upaya mengatasi kebutuhan beras yang terus meningkat tersebut, Departemen Pertanian melaksanakan kegiatan pengkajian Sistem Usahatani Berbasis Padi dengan Orientasi Agribisnis (SUTPA) pada tahun 1995 (Puslit Sosek Pertanian, 1999).

Sistem Usahatani Berbasis Padi dengan Orientasi Agribisnis (SUTPA) Tahun 1995

SUTPA memperkenalkan *hard technology* yang spesifik yaitu : (1) varietas unggul Membramo dan Cibodas; (2) pemupukan spesifik lokasi berdasarkan hasil analisa tanah, terutama pupuk P dan K; (3) pengenalan sistem tanam benih langsung (tabela) dan urea aplikator; dan (4) pola tanam setahun. Secara teknis, SUTPA diimplementasikan berdasarkan pendekatan ekoregional dimana areal program telah deliniasi menurut kondisi agroekosistem yang berdasarkan pendekatan multidisiplin. Teknologi yang dikembangkan adalah teknologi yang sudah lulus dalam pengujian untuk dikembangkan secara komersial.

SUTPA mengembangkan *soft technology* berprinsip agribisnis dan diversifikasi pertanian secara vertikal, horizontal dan regional. Secara vertikal dikembangkan keterkaitan antara kegiatan usahatani dengan lembaga pengadaan sarana produksi, lembaga jasa alsintan, lembaga pemasaran dan perdagangan internasional. Secara horizontal usahatani padi yang dikembangkan sebagai komoditas unggulan disertai komoditas lainnya sebagai usaha pelengkap untuk mengoptimalkan sumberdaya alam, modal, tenaga kerja serta memperkecil terjadinya resiko kegagalan usaha. Secara regional pengembangan komoditas pertanian unggulan spesifik lokasi selalu melibatkan partisipasi petani.

Walaupun teknologi yang diimplementasikan SUTPA sudah lulus dari pengujian namun peningkatannya terhadap produksi padi di lapangan ternyata belum signifikan, Tabel 2 menunjukkan bahwa import beras tetap terjadi dan jumlahnya semakin meningkat. Sebagai tindak lanjut dari usaha mensosialisasikan orientasi agribisnis dalam intensifikasi usahatani, pemerintah memperkenalkan program intensifikasi berwawasan agribisnis (Inbis) pada tahun 1997.

Intensifikasi Berwawasan Agribisnis (Inbis) Tahun 1997

Aktualisasi dari intensifikasi agribisnis adalah adanya rekayasa nilai tambah pada kegiatan *off-farm* yang meliputi aspek-aspek pengolahan hasil, pemasaran hasil, kemitraan, standarisasi dan kelembagaan. Inbis pada prinsipnya menerapkan 12 komponen rekayasa teknologi yang disesuaikan dengan spesifik lokasi. Dua belas komponen tersebut adalah: (1) pengolahan tanah secara bijak, (2) penggunaan benih unggul bermutu, (3) efisiensi pemakaian air, (4) penetapan cara tanam, (5) ameliorasi dan atau pemupukan berimbang, (6) pengelolaan bahan organik, (7) pengendalian organisasi pengganggu tanaman, (8) pengembangan alsintan, (9) pola tanam tahunan, (10) panen dan pascapanen, (11) jaminan pemasaran, dan (12) skala usahatani berorientasi agribisnis dan agro-industri. Kedua belas komponen tersebut diaplikasikan melalui lima jalur sumber pertumbuhan produksi yaitu: perluasan areal panen melalui peningkatan Indeks Pertanaman, peningkatan produktivitas, peningkatan stabili-

tas, menekan senjang stabilitas, dan menekan kehilangan hasil.

Bersamaan dengan diimplementasikannya Inbis, pada tahun 1997 terjadi musim kering panjang yang disebabkan adanya fenomena cuaca/iklim El-Nino yang terjadi di Pasifik Selatan. Fenomena iklim tersebut berdampak pada mundurnya musim tanam selama 2-3 bulan dan menyebabkan turunnya produksi pangan. Untuk mengatasi kekurangan pangan yang terus meningkat pemerintah melakukan import, Inbis diterapkan untuk mengupayakan terobosan paket teknologi melalui Upaya Khusus (Upsus) yang diwujudkan melalui Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI). Untuk menggugah masyarakat dan mensosialisasikan program PMI di wilayah yang cukup luas tersebut dilakukan "Gerakan" yang dikenal dengan Gema Palagung.

Gema Palagung (Gerakan Mandiri Padi, Kedelai dan Jagung) Tahun 1998

Gema Palagung diimplementasikan pada 233 Kabupaten, mengikutsertakan 70.000 kelompok tani pada Musim Kering kedua tahun 1998 dengan luas areal 195.988 Ha. dan Musim Hujan (1998/99) seluas 7.325.805 ha. Gema palagung diaktualisasikan melalui 3 program yaitu: (1) Peningkatan Mutu Intensifikasi, (2) IP -200 untuk padi, jagung dan kedelai, dan (3) IP-300 untuk padi (Supadmo *et al.*, 1999).

Gema Palagung menerapkan *hard technology* Sapta Usaha Supra Insus, sedangkan peningkatan mutunya terletak pada *soft technology* yaitu pengembangan kelembagaan dan kredit usaha tani (KUT). Pengembangan kelembagaan meliputi 7 kegiatan yaitu: (1) revitalisasi kelompok tani, (2) musyawarah kegiatan kelompok tani, (3) gerakan penerapan teknologi, (4) gerakan penanganan panen dan pasca panen, (5) peningkatan usahatani terpadu, (6) kursus tani dan (7) temu usaha kemitraan (Sekretariat Pengendali Bimas, 1998)

Melalui program PMI diharapkan produksi padi meningkat rata-rata 0,3 ton/ha sehingga ditargetkan pada tahun 2001 swasembada pangan (padi, kedelai dan jagung) dapat dicapai kembali. Ternyata sampai dengan tahun 2001 target tersebut tidak dapat dicapai. Swasembada beras juga belum

dicapai karena terbukti Indonesia masih terus mengimport beras.

Belum berhasilnya program PMI di Jawa disebabkan faktor teknis dan non-teknis (Irawan *et al.*, 2002). Faktor teknis tersebut diantaranya adalah karena paket teknologi yang dianjurkan masih bersifat umum sehingga implementasinya kurang sesuai dengan kondisi lokal, pengadaan sarana produksi tidak sesuai dengan kualitas dan waktu yang dijanjikan, dan persyaratan implementasi seperti penentuan lokasi, kelompok tani dan petani penerima program sangat ketat. Beratnya persyaratan program dijumpai di Jawa Tengah (Wahyuni dan Rahmanto, 2003). Pada lokasi yang belum menerapkan teknologi Supra Insus secara penuh, PMI tidak dilaksanakan oleh petugas lapang karena khawatir tidak akan berhasil. Berdasarkan pengalaman petugas lapang, untuk menerapkan teknologi baru sangatlah tidak mudah dan perlu jangka waktu yang cukup lama. Persyaratan yang ketat tersebut membuat Rencana Usulan Kelompok (RUK) dan Rencana Usulan Anggota Kelompok (RUAK) yang layak sulit untuk dicapai petani. Diakui oleh petugas bahwa RUK dan RUAK dibuatkan oleh PPL. Demikian pula dengan syarat lainnya, yaitu petani penerima yang harus lahan sempit. Dengan lahan 0,25 ha penghasilan yang diperoleh petani tidak akan cukup untuk mengembalikan pinjaman. Hal ini menyebabkan tidak dilunasinya pinjaman KUT. Penyebab lain dari tunggakan KUT adalah petani mengambil kredit tetapi uangnya tidak dipakai untuk usahatani, dan adanya campur tangan Koperasi Unit Desa (KUD) dimana citra KUD kurang bagus dimata petani, sehingga mereka enggan mengembalikan hutang melalui KUD.

Didasarkan pada pengalaman PMI, dimana penerapan *hard technology* masih perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah, maka suatu program hendaknya dibuat secara spesifik lokasi, yang berarti dalam penyusunannya perlu dibuat secara partisipatif. Hal yang sama juga dijumpai dalam penerapan *soft technology* diantaranya berkaitan dengan kemampuan petani dalam memanfaatkan dan mengembalikan kredit.

Dihadapkan pada fakta kurang berhasilnya program yang telah diimplementasikan dan berbagai fakta yang ditemui berupa skala usahatani yang mayoritas sempit, pangsa

pendapatan usahatani terhadap total pendapatan yang sangat rendah, usahatani padi bukan merupakan kegiatan utama petani melainkan hanya sampingan (*part timer*), dan intensitas perhatian pada usahatani rendah; maka usahatani menjadi tidak ekonomis. Di sisi lain, adanya globalisasi menuntut kualitas produk yang bersaing dimana untuk meningkatkan daya saing produk diperlukan penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, dan diversifikasi. Menurut Prakosa (2000) untuk mengimplementasikan keempat syarat tersebut diperlukan kesatuan manajemen yang terpadu, agar peningkatan daya saing produk dapat dicapai. Keterpaduan tersebut akan dicapai jika dilakukan pendekatan korporasi (*corporate strategy*) sehingga lahirlah usahatani korporasi (*Corporate Farming*) pada tahun 2000.

Usahatani Korporasi (*Corporate Farming*) Tahun 2000

Inti dari pendekatan korporasi (*CF*) adalah adanya satu keputusan dari satu kelompok dalam menerapkan manajemen, mulai dari kegiatan pendukung sampai pada kegiatan inti. *CF* merupakan suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan sehamparan dengan tetap menjamin kepemilikan pada masing-masing petani (Prakosa, 2000).

Tujuan pengembangan model *CF* adalah menjadikan usahatani padi layak menjadi sumber pendapatan. Tujuan pembinaan petani dalam kelompok untuk melakukan berbagai jenis konsolidasi adalah meningkatkan efisiensi usahatani dan memudahkan pembinaan.

Dengan orientasi agribisnis, diharapkan efisiensi usaha, standarisasi mutu, dan efisiensi sumberdaya dapat dicapai. Dengan efisiensi sumberdaya, terutama tenaga kerja, diharapkan petani mempunyai kesempatan, kemampuan dan kemauan mencari alternatif lain pada bidang *off-farm* dan *non-farm*. Dibandingkan Inbis yang hanya mencakup *on-farm* dan *off-farm*, *CF* mencakup seluruh kegiatan petani. Sedangkan beda *CF* dengan *group farming (GF)* dalam Insus terletak pada cara pengambilan keputusan. Dalam *CF* keputusan berada dalam satu kesatuan sedangkan

GF pada masing-masing individu dalam grup yang bersangkutan.

Hasil pengkajian model CF di 7 provinsi oleh Tim Pokja Pusat (2001) diperoleh informasi bahwa petani bersedia melakukan kegiatan secara kolektif jika ada manfaatnya, yaitu keuntungan dari usahatani bertambah, penurunan biaya produksi, pengurangan risiko, pemanfaatan sumber daya, jaminan pasar dan manfaat yang dapat dirasakan langsung maupun tidak langsung. Petani berpersepsi bahwa manajemen usahatani mencakup konsolidasi lahan dan mereka menolak hal tersebut. Alasan menolak tersebut diantaranya petani tidak mempunyai pekerjaan alternatif yang lebih baik walaupun pendapatan dari usahatani diakui kecil.

Usaha untuk mengimplementasikan usahatani berskala agribisnis dan manajemen profesional terus diupayakan oleh pemerintah dengan memberdayakan petani melalui pendekatan kelompok. Dalam konteks itu, maka dalam Program Peningkatan Ketahanan Pangan dilengkapi dengan kegiatan Proyek pemberdayaan petani melalui pengembangan usaha kelompok. Dalam dokumen resmi kegiatan ini dinamakan "proyek pengembangan ketahanan pangan dalam pengembangan sarana dan prasarana pertanian", namun petani mengenalnya dengan PKP (Proyek Ketahanan Pangan).

PKP (Proyek Ketahanan Pangan) Tahun 2000

Dalam pelaksanaan kegiatan PKP kriteria yang ditetapkan terhadap petani peserta adalah luas hamparan tertentu agar dicapai skala agribisnis, menunjuk seorang manajer dengan kriteria tertentu pula agar usahatani dikelola secara profesional, dan memberikan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk kegiatan *on-farm*, *off-farm* maupun *non-farm* sebagai *seed capital*.

Hasil evaluasi terhadap PKP oleh Inspektorat Jenderal (2003) melaporkan bahwa 70 persen kelompok tani memperoleh peningkatan pendapatan sebesar rata-rata 11 persen. Namun demikian hanya 71 persen petani yang mengembalikan BLM tepat jumlah dan waktu. Dana BLM yang semula untuk usahatani, pada tahun kedua (sebanyak 20%) dimanfaatkan untuk kegiatan jasa simpan

pinjam. Hanya 60 persen kelompok tani yang memanfaatkan dana sesuai dengan RUK, karena sebagian dana dipakai untuk usaha dagang, pelayanan jasa, pembelian meubeler kantor dan kebutuhan rumah tangga. Sampai dengan tahun 2002 baru sekitar 60 persen kelompok tani yang memulai usaha agribisnis dan tumbuhnya hubungan kemitraan baru mencapai 40 persen. Hasil yang diperoleh tersebut belum maksimal karena ada permasalahan sebagai berikut: (1) Pedoman sampai di lokasi terlambat sehingga pencairan dana terlambat maka kebutuhan petani tidak dapat dipenuhi tepat waktu; (2) Pemanfaatan dana BLM tidak sesuai dengan RUK; (3) Ada intervensi petugas proyek dimana petani tidak menerima uang tetapi saprodi; (4) Kemampuan kelompok dalam administrasi belum memadai; (5) Belum ada pengaturan tentang pengembalian dan sanksi bagi yang tidak mengembalikan dana BLM; (6) Pengelolaan BLM belum ada perjanjian tertulis antara proyek dan kelompok; (7) Pendapatan belum sesuai karena adanya serangan hama, kekeringan, banjir dan penerapan teknologi yang sesuai anjuran; dan (8) Perkembangan kegiatan BLM sulit dimonitor secara akurat karena tidak ada dana pembinaan dan pemantauan dari APBN maupun APBD.

Dengan memperhatikan keberhasilan yang dicapai PKP dan mengantisipasi keagalannya, pemerintah sedang menguji suatu model teknologi dengan prinsip memprioritaskan pemecahan masalah setempat (petani dan lahannya). Program tersebut disebut dengan Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) tahun 2001 (Badan Litbang Pertanian 2002).

TEKNOLOGI DALAM PENGUJIAN

Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) Tahun 2001

Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) adalah salah satu alternatif pengelolaan padi secara intensif dan holistik di daerah irigasi. Dikatakan holistik karena diimplementasikan secara terpadu mencakup : (1) komponen pengelolaan tanaman secara terpadu *Integrated Pest Management* (IPM), *Integrated Water Management* (IWM), dan *Integrated Weed Management* (IWM); (2)

keterpaduan antar instansi; dan (3) keterpaduan ilmu pengetahuan dan keterpaduan analisis dan interpretasi. Tujuan PTT adalah meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai ekonomi usahatani melalui efisiensi input, dan melestarikan sumberdaya untuk keberlanjutan sistem produksi

Untuk wilayah yang produktivitas padinya dibawah rata-rata provinsi, PTT digabungkan dengan Sistem Integrasi Padi Ternak (ISPT) dan diseminasinya dipacu melalui pilot proyek sehingga lahir percontohan Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T). Tujuan P3T adalah terselenggaranya intensifikasi berlandaskan teknologi Pertanian, lahirnya lembaga-lembaga berazaskan kemandirian petani dalam memperkuat modal sendiri, dan terbukanya peluang bagi swasta dalam semua proses agribisnis.

Teknologi yang dikembangkan dalam Peningkatan Produktivitas Padi Terpadu (P3T) terdiri dari tiga paket utama yaitu pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT) padi sawah irigasi, Sistem Integrasi Padi Ternak (SIPT) dan Teknologi produksi benih dan padi hibrida.

Penerapan teknologi didampingi dengan pengembangan kelembagaan berupa Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu (KUAT) (Soentoro *et al.*, 2002). Lembaga ini diharapkan menjadi embrio dari koperasi atau perusahaan daerah yang ditumbuhkan secara partisipatif dimana KUAT dibentuk karena lima alasan. Alasan-alasan tersebut adalah BRI unit desa tidak melayani lagi kredit untuk inovasi Pertanian, KUT macet karena tunggakan besar, KLBI sebagai bantuan modal kegiatan KUD dihapus, Kredit pola bergulir yang diperkenalkan pemerintah tidak dijamin keberlanjutannya, dan pengalaman keberhasilan KUM.

Sumber modal kegiatan ini berasal APBN yang menyediakan dana bantuan kredit untuk menggerakkan usaha agribisnis berupa *seed capital* dengan pola KUM sebesar Rp 50.000.000/kelompok. Dana bantuan dalam bentuk kredit uang tunai dikelola melalui KUAT dengan aturan sebagai berikut: (1) Struktur organisasi kuat, (2) Ada forum perwakilan kelompok, (3) *Site manager* kuat, (4) ada Wakil *site manager*, (5) Seksi kredit program, (6) KUM, (7) Petugas lapang, minimal 2 orang,

(8) Petugas administrasi keuangan dan (9) Operator komputer.

Hasil uji coba PTT di 3 provinsi menunjukkan peningkatan produksi padi antara 8 - 22 persen dibanding cara petani (Puslitbangtan, 2002). Sedangkan hasil dari 8 provinsi naik 7-38 persen (Fagi *et al.*, 2002) dengan input lebih rendah dari pada petani yaitu R/C ratio antara 1,4 – 2,9. PTT mempunyai makna yang sangat berarti dalam budidaya padi dan pembangunan pertanian nasional. Dasar pertimbangannya adalah komponen teknologinya merupakan hasil mega proyek yang dirakit dalam suatu paket teknologi dimana efek secara kumulatif lebih besar dari efek secara individual. Sinergisme antar komponen dan antar paket teknologi diharapkan menghasilkan interaksi positif dengan lingkungan tumbuh padi. Keberlanjutan adopsi teknologi perlu memperhatikan modal usahatani, potensi sumberdaya dan akses ke pasar. Berdasarkan pencapaian hasil dan makna yang telah dikemukakan Fagi *et al.* (2002) mempercayai bahwa PTT mempunyai prospek untuk diperluas penerapannya.

Sosialisasi Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT)

Sosialisasi program PTT yang dinilai efektif adalah melalui beberapa media massa, terutama media elektronik (khususnya televisi). Apakah mungkin sosialisasi program pertanian melalui media televisi? Dilihat dari akses petani untuk menonton televisi relatif tidak sulit. Sebagai contoh pada waktu televisi belum banyak dimiliki oleh masyarakat, di tempat-tempat tertentu disediakan televisi untuk umum. Contoh lain pada waktu ada pertandingan sepak bola dunia, banyak sekali televisi yang sengaja diadakan oleh berbagai fihak secara sukarela di lokasi umum sehingga bisa dinikmati oleh umum. Agar sosialisasi dapat ditayangkan melalui televisi maka informasi perlu dikemas dalam sosiodrama agar sekaligus menjadi hiburan namun tanpa mengurangi misi. Contoh-contoh sederhana adalah sosiodrama yang sering dipentaskan oleh kelompok kesenian di Bali dalam berbagai acara bahkan sampai di tingkat Banjar. Contoh riil seperti yang pernah ditayangkan oleh TVRI sekitar 3 bulan yang lalu tentang bagaimana suatu kelompok tani bertahan dalam menentukan kemana harus

menjual padinya saat panen raya untuk menghindari tengkulak. Tayangan lain yang sedang digarap oleh salah satu stasiun Televisi Swasta adalah tentang usahatani jambu mete di Lombok Barat yang menggambarkan bagaimana membudidayakan jambu mete sehingga memberi kesejahteraan masyarakat. Penayangan sosiodrama semacam ini perlu dilanjutkan secara lebih intensif karena disamping tersosialisasi dalam skala luas sekaligus diharapkan adanya umpan balik bagi perbaikan program sedini mungkin.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisa terhadap 11 (sebelas) program P4 yang telah diimplementasikan, disimpulkan bahwa mulai program Padi Sentra sampai dengan Supra Insus target program utamanya adalah produksi dan produktivitas. Swasembada beras memang tercapai pada tahun 1980 namun hanya bertahan kurang dari satu dasawarsa. Adanya stagnasi dan ketidakstabilan produksi menyadarkan bahwa intensifikasi menyebabkan *technology fatigue*. Menyadari kondisi tersebut lahir program SUTPA yang pendekatannya multi disiplin, ekoregional, berorientasi agribisnis dan diversifikasi.

Program-program selanjutnya merupakan penyempurnaan program SUTPA yang intinya membuat program yang berorientasi holistik dan jangka panjang. Sampai saat ini usaha-usaha yang telah dihasilkan belum memberi hasil. PTT merupakan program peningkatan produksi padi yang paling mutakhir yang telah dirancang sedemikian sempurna berdasarkan pengalaman, kelemahan dan kekuatan program sebelumnya. Disamping itu dibanding petani non PTT produksi petani PTT lebih besar 7-38 persen dengan R/C rasio 1,4-2,9. Dengan alasan tersebut, maka penulis menilai bahwa PTT dapat menjadi dasar kebijakan Program Peningkatan Produksi Padi (P4). Namun demikian, agar PTT dapat diadopsi secara meluas, berbagai permasalahan masih dihadapi yaitu :

(1) Agroekosistem di Indonesia sangat bervariasi, maka diperlukan upaya agar penerapan PTT dapat diadaptasikan dengan kondisi agroekosistem yang beragam tersebut.

- (2) Badan Litbang kurang memiliki kemampuan untuk menyebarluaskan teknologi yang telah dihasilkan dalam skala luas (Pasandaran, 2001).
- (3) Pemanfaatan teknologi pertanian masih sangat rendah, tercermin dari indeks pencapaian teknologi (*Technology Achievement Index*) Indonesia yang menduduki urutan ke 62 dari 72 negara (Menristek, 2003).
- (4) Adopsi teknologi tidak mudah, banyak faktor yang menentukan namun demikian dengan sosialisasi program sampai ke sasaran dapat menjamin keberhasilan program. Wahyuni (2003) menyimpulkan bahwa sosialisasi program harus mencakup 5 W dan H, yaitu *what*-apa jenis program, *why*-mengapa program harus dilaksanakan, *When*-kapan dan *Where*-dimana program diimplementasikan, *who*-siapa yang harus ditemui petani untuk memperoleh semua kejelasan berkaitan dengan program dan *How*-bagaimana program harus dilakukan. Dalam mensosialisasikan suatu program mutlak diperlukan pendekatan partisipatif dan adanya buku pedoman baku untuk sosialisasi agar diperoleh persepsi yang sama antar petugas maupun antara petugas dan sasaran.

Memperhatikan pertimbangan diatas, penulis mengusulkan digalakkannya sosialisasi PTT dalam skala luas dan sedini mungkin. Dari pengamatan penulis, sesuatu yang baru sangat mudah tersebar luas melalui berbagai media terutama televisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, D.A. 1985. Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan Dalam Pembangunan pertanian Berencana. Kasus Usahatani Berkelompok Sehamparan dalam Intensifikasi Khusus (Insus) Padi. Disertasi Doktor yang tidak dipublikasikan. Universitas Pajajaran. Bandung.
- Badan Pusat Statistik. 1999. Statistik Perdagangan Luar Negeri. Import. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 2002. Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu Padi Sawah Irigasi. Departemen Pertanian Jakarta.

- Balai Penelitian Tanaman Padi. 2002. Penelitian Padi: Menjawab Tantangan Ketahanan Pangan Nasional. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Jakarta.
- Budianto, Joko. 2000. Pembangunan Pertanian Berkelanjutan Pada Era Globalisasi. Seminar Nasional Budidaya Pertanian Olah Tanah Konservasi VII. Himpunan Ilmu Gulma Indonesia. Banjarmasin. 23-24 Agustus.
- Departemen Pertanian. 2000. Pedoman Umum Proyek Pengembangan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2000. Juli.
- Direktorat Jenderal Bina Produksi Tanaman Pangan. 2001. Rencana Strategis. Pembangunan Tanaman Pangan. 2001 – 2004. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Direktorat Jendral Bina Produksi Tanaman Pangan. 2002. Program Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan Tahun, 2002. Departemen Pertanian.
- Fagi, A.M., S. Abdurachman dan A. Gani. 2002. Teknologi Budidaya Padi. Perkembangan dan Peluang. In Press.
- Irawan, B., N. Syafa'at., R. Sayuti., S. Wahyuni., B. Rahmanto., A. Setianto dan H. Hidayat. 2002. Perumusan Program Peningkatan Produktivitas Padi di Jawa. Laporan Akhir. BPK dan PSE, Badan Litbang Deptan. Jakarta.
- Inspektorat Jendral, 2002. Evaluasi Kinerja proyek BLM. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Menristek R.I. 2003. Sambutan Seminar Nasional Peringatan Hari Pangan Sedunia. Penerapan Peran Teknologi dan Gender dalam Memantapkan Ketahanan Pangan. Jakarta. Pp5.
- Nataatmadja, H., D. Kertosastro dan A. Suryana. 1988. Perkembangan Produksi dan kebijakan Pemerintah dalam Produksi Beras Monograph Padi Buku 1. Puslitbangtan. Penyunting Ismunadji M, S. Partohardjono, M. Syam dan A.Widjiono. (halaman 37-53).
- Pasandaran, E. 2001. Rumusan Hasil Lokakarya Padi. Prosiding Implementasi Kebijakan Strategis untuk meningkatkan Produksi Padi Berwawasan Agribisnis dan Lingkungan. Puslitbang Tanaman Pangan. Badan Litbang, Deptan.
- Prakosa, M. 2000. Pendekatan Corporate Farming dalam Pengembangan Agribisnis. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. 2002. Pengembangan Model Pengelolaan Tanaman Terpadu di Sentra produksi Padi. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Vol. 24. No.6.
- Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. 1999. Pengkajian SUTPA.: Konsep, Keragaan Empiris dan Prospek. Monograph Series No.19. Laporan Hasil Penelitian.
- Slamet, M. 1986. Pengantar Penyuluhan Pertanian. Bahan Kuliah Mahasiswa Magister Science. IPB-Bogor.
- Soentoro., M Syukur., Sugiarto. Dan H. Supriyadi. 2002. Panduan Teknis Pengembangan Kelembagaan Kelompok Usaha Agribisnis Terpadu. Departemen Pertanian.
- Supadmo, her., R. Widarto., Joko Handoyo., Kendriyanto., Hairil Anwar., Sudarno. OMJ Fachrudin., Imam Sudigdo dan Tri Reni Prastuti. 1999. Introduksi model Peogram IP300. Badan Litbang. Deptan.
- Surono, Sulastri. 2001. Perkembangan Produksi dan Kebutuhan Beras serta Kebijakan Pemerintah untuk Melindungi Petani. Bunga Rampai Ekonomi Beras (Suryana dan Mardianto). LPEM-FEUI. Jakarta.
- Suryana, A., E.m. Lokollo., J. Situmorang dan M. Rachmat. 1981. Keragaan Intensifikasi Khusus (INSUS) Padi : Suatu Telaahan pada Suatu Kelompok Tani di Kabupaten Malang dan Banyuwangi. Jawa Timur. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Suryana, A., L.A. Daud., J. Situmorang dan B. Irawan 1992. Pengelolaan Usahatani Padi Sawah INSUS dan INMUM. Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Badan Litbang Departemen Pertanian. Jakarta
- Tim Pokja Teknologi Pusat, 2001. Pengkajian *Corporate Farming* di Tujuh Provinsi. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Wahyuni, S. dan B. Rahmanto. 2003. Analisis Kebutuhan Petani tentang Teknologi Padi. Seminar Rutin Kelti Kelembagaan dan Organisasi Pertanian Pedesaan. Puslitbang Sosek Pertanian. Bogor. Januari 21.
- Wahyuni, S. 2003. Kinerja Kelompok Tani dalam Sistem Usahatani Padi dan Metode Pemberdayaannya. Jurnal Badan Litbang. 22(1):1-8.